ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) BD KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO 1

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NO 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu adanya pedoman penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;

- Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 47 Tahun 1999, Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;

- Peraturan ini menguraikan definisi, tujuan, dan prosedur penyelenggaraan Andalalin, dengan mengelompokkan pembangunan berdasarkan potensi pembangkitan lalu lintas. Peraturan ini juga menetapkan tanggung jawab pengembang, persyaratan dokumentasi, dan proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk. Selain itu, peraturan ini menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi manajemen lalu lintas, beserta sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas;

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025

- Lampiran 21 Halaman